

## **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN MELALUI KOPERASI WARGA YANG BERBASIS MASYARAKAT (*Poor Women Empowerment through Community Based Cooperation*)**

**Bambang Ipujono MASKUN**

**Abstract** This study investigated women empowerment in local community using case study method at Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, West Jakarta. This site was chosen as the location for the study, representing one of the poor enclaves in Jakarta. The purpose of this study is to know the characteristics of Kesuma Tiara as a media for empowerment process in poverty alleviation and to know how the process of empowerment performed to the members of the Kesuma Tiara Group and how the empowering processes of personal, interpersonal and political grow as the impact of the empowerment. The study has indicated that Kesuma Tiara Group has accomplished the empowerment process to its member with the outcome in the form of power and/or capabilities in personal, interpersonal and political, processes. Therefore, this group has succeeded in poverty alleviation of a group of people in the grass roots level by empowering them, because women groups have the immediate and double impact on poverty in their family. This study has recommended that the activities of Kesuma Tiara Group in its effort to alleviate poverty in grassroots level group can be used as model for other cases in women empowerment to alleviate poverty.

**Kata Kunci:** Women empowerment, Koperasi warga, Kemiskinan

---

### **1. LATAR BELAKANG**

Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 telah meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia, dari 25,9 juta (17,7 %) pada tahun 1993 (akhir Repelita V) menjadi 129,6 juta atau 66,3 % dari jumlah penduduk pada tahun 1999 (BPS, 1999). Dari populasi penduduk miskin tadi, termasuk didalamnya kelompok perempuan yang rentan masalah sosial ekonomi (39,7%). Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya perkembangan masalah sosial dan politik yang terjadi akhir-akhir ini seperti disintegrasi,

kerusuhan, ketidakamanan serta tenaga kerja illegal yang dipulangkan ke Indonesia yang makin memperburuk masalah perekonomian di Indonesia dan pada akhirnya berdampak pada penambahan angka kemiskinan. Perlu diketahui juga bahwa tenaga TKI illegal yang dipulangkan ke Indonesia, sebagian besar adalah kaum perempuan dengan berbagai permasalahan yang dialami selama berada di negara tetangga. Umumnya mereka ini tenaga kerja perempuan yang tidak/belum memiliki ketrampilan dan pendidikan rendah rata-rata SD/SLTP. Kembalinya

tenaga perempuan ke Indonesia yang sebagian besar di PHK tadi menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.

Peningkatan angka kemiskinan tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi terjadi juga di daerah perkotaan di Indonesia. Penyebab lain kemiskinan di kota adalah akibatnya urbanisasi yang disertai dengan membanjirnya orang miskin dari daerah pedesaan baik laki-laki, perempuan, tua, muda dan anak-anak yang mengadu nasibnya ke daerah perkotaan. Jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2001 sebanyak 86.989.625 jiwa atau 43,12 % dari jumlah penduduk Indonesia (BPS: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 17). *Robert Lawang* di dalam buku pergeseran pola relasi gender di kalangan migran mengatakan bahwa pergeseran jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan akan mendekati angka 70% dan sisanya tinggal di daerah pedesaan sebagian dari mereka adalah perempuan, apabila desa tidak dibangun dengan program yang jelas dan terbatasnya daya serap lapangan pekerjaan, maka penduduk akan berbondong-bondong urbanisasi ke kota dan akan menimbulkan permasalahan baru di perkotaan.

Masalah kemiskinan di perkotaan mempunyai korelasi yang cukup signifikan dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang dihadapi oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan gizi, perumahan dan lingkungan serta lapangan pekerjaan. Permasalahan tersebut juga mempengaruhi ketidakpastian hidup bagi komunitas miskin yang didefinisikan oleh *Moser* (1996) sebagai ketidakamanan & ketidakpastian dalam

kesejahteraan individu, rumah tangga dan masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan lingkungan mereka.

Salah satu yang paling terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan pokok keluarga miskin adalah kelompok perempuan/istri sebagai penanggung jawab eksistensi keluarga setelah suami. Kelompok perempuan secara statistik di Indonesia jumlahnya relatif lebih tinggi daripada jumlah pria, akan tetapi akses dan kesempatan untuk menerima pembangunan berbeda, khususnya dalam perolehan posisi di berbagai ruang pemerintahan lapangan pekerjaan seperti di eksekutif, legislatif dan di yudikatif. Berdasarkan data hasil seminar tentang peranan wanita tahun 2002 oleh DNIKS Jakarta, menunjukkan bahwa keterwakilan wanita di Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat Nasional mulai dari masa Demokrasi Parlementer (DPR sementara), keterwakilan perempuan hanya 3,8 % dari 237 jumlah anggota, dan untuk tingkat kabupaten/kota yang ada hanya 0%.

Dari ilustrasi tentang deskripsi kesempatan kerja dan posisi tawar (*Bargaining position*) perempuan di legislatif tadi terlihat dengan jelas bahwa perempuan tetap saja tidak mempunyai kesempatan atau diberi kesempatan untuk berkiprah di legislatif walaupun undang-undangnya sudah ada, secara politik perempuan tetap saja ter subordinat. Sebenarnya perempuan mempunyai hak & kewajiban yang sama dengan pria, hal ini dibuktikan dengan telah ditanda tangannya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita oleh pemerintah Indonesia di Konvenhagen tahun 1980 yang *follow up*-nya telah dirasifikasi dengan UU No 7/1984 tentang

pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Sedangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa pemerintah RI wajib memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia tanpa pengecualian dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Namun karena kehidupan sosial kemasyarakatan sangat dinamis sehingga dalam kenyataan hidup sehari-hari ditemukan perlakuan dan pemberian "penghargaan" yang tidak adil terhadap perempuan (*Disequality of woman appresiation*).

Dalam sektor pendidikan jumlah perempuan buta huruf dua kali lebih besar dibanding laki-laki. Angka paling menyolok terlihat pada jenjang tingkat pendidikan SMU ke atas, yaitu 20,5 % untuk laki-laki dan 14,9 % untuk perempuan. Pada sektor kesehatan, kondisi perempuan lebih rentan dari pada laki-laki karena fungsi reproduksinya seperti hamil dan melahirkan. Saat ini angka kematian ibu (AKI) di Indonesia adalah tertinggi kedua setelah Vietnam, yaitu 490/100.000 kelahiran hidup. Hal ini diperparah dengan adanya beban sosio kultural yang harus diemban perempuan dalam mengurus anak-anak dan rumah tangga. Sebuah jenis pekerjaan yang tampaknya ringan, namun sebenarnya sangat berat dan berpengaruh pada status kesehatan wanita. Menurut *Susenas 1998*, dalam formasi rumah tangga, jumlah perempuan sebagai kepala keluarga karena suami meninggal, tidak menikah, cerai atau suami bekerja di luar kota dalam waktu lama meningkat dari 12,8 % pada tahun 1996 menjadi 13,2 % pada tahun 1998. Sedangkan dalam tingkat partisipasi

angkatan kerja terdapat kecenderungan yang lebih memprihatinkan. Tenaga kerja wanita yang terserap di dunia kerja hanya 45,6 % sedangkan pria 73,5 %. Hal ini dapat kita lihat pada posisi yang ada di eksekutif, berdasarkan data yang ada di kementerian PAN Th.1999, diperoleh data bahwa posisi eselon IV ke atas hanya 48% saja dipegang oleh kaum perempuan. Apalagi untuk di posisi yudikatif dan legislatif kesempatan itu lebih terselektif lagi. Sungguh ironis *Top Leader* di Indonesia perempuan, tetapi kesempatan pemberdayaan terhadap perempuan terbatas.

Data di atas menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kesempatan yang tidak sama dengan laki-laki dalam mengakses berbagai sistem sumber. Oleh karena itu tidaklah heran apabila sampai saat ini perempuan masih dianggap *subordinat* yang peranannya dinilai lebih rendah dari pada laki-laki. Perempuan juga dianggap sebagai kelompok *marginal*, dengan anggapan bahwa peran utama perempuan adalah di dalam rumah (domestik), walaupun bekerja di luar rumah, maka dia sebagai pencari nafkah tambahan. Ketika perempuan bekerja di luar rumah (sektor publik) tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga, sehingga perempuan mengalami beban yang berlipat ganda (*double function*). Jika perempuan tidak memiliki keterampilan untuk bekerja menambah penghasilan di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial keluarga, maka beban yang ditanggung akan lebih berat lagi, padahal perempuan mempunyai hak yang sama dengan pria (*The Equity Woman right*). Disatu sisi perempuan dituntut untuk ikut bertanggung jawab terhadap eksistensi keluarga, namun

disisi lain kenyataannya sangat terbatas dibandingkan pria. Untuk memperkuat adanya alasan kesamaan antara pria dan perempuan tadi maka secara yuridis Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita tahun 1980 di Kopanhagen yang Follow up nya telah dirasifikasi dalam UU No.7/1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Pada tahun 1995 dalam Declaration for the Advancement of Woman in Asia and the Pacific terdapat *Mission Statement Plant of Action* yang tujuannya adalah mengenai kedudukan antara perempuan sebagai peserta pengambil keputusan dan penikmat dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Ketidakberdayaan atau ketidakadilan bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan diberbagai ruang yang tadi, mungkin saja karena perempuan tidak memiliki kemampuan atau kualitas yang memang benar-benar sama dengan pria, sehingga timbul image bahwa wanita dinilai tidak mampu atau tidak berdaya. Oleh karena perlu dicarikan solusi bagaimana upaya memberdayakan perempuan agar memiliki kedudukan yang sama dengan pria.

---

## 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, maka bermunculan program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan

perempuan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat/LSM, tetapi program-program ini sifatnya masih *top down* (intruksi dari pusat ke daerah secara seragam), sehingga jarang ada program yang bertahan lama (*Hit and Run*). Proyek selesai, program penanggulangan kemiskinan selesai pula yang penting adalah laporan keuangan secara administratif bisa dipertanggung jawabkan. Berdasarkan hal tersebut, maka program-program yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat akar rumput (lokal) melalui kelompok-kelompok tradisional (*traditional indigenous grouping*) yang telah hidup di masyarakat seperti kelompok arisan, pengajian, pembagian beras untuk masyarakat miskin kegiatan usaha ekonomi yang berbasis masyarakat menjadi hal yang efektif dan strategis untuk penanganan masalah kemiskinan di komunitas lokal. Hal ini sependapat dengan Jim Ife (1995 : 133-143) yang mengemukakan bahwa dalam rangka pembangunan sosial perlu memperhatikan :

1. *Ketersediaan pelayanan sosial di tingkat lokal* (tradisional, ekonomi, sosial) sehingga memudahkan *Social Service Delivery* yang relatif lebih dekat, cepat dan murah.
2. *Community Institution (Community Based System)*, bagaimana keberfungsian lembaga-lembaga pelayanan sosial baik dari kelompok-kelompok tradisional, lembaga pelayanan ekonomi, lembaga pelayanan sosial.

Strategi ini juga merujuk pada perubahan paradigma pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi di mana kecenderungan pemberdayaan dan mobilisasi masyarakat warga

melalui infrastruktur sosial masyarakat tingkat lokal menjadi hal yang strategis khususnya bagi perempuan dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial warganya di suatu lingkungan. Keberadaan wahana masyarakat lokal ini menjadi hal yang penting karena eksistensinya mengarah pada *kohesivitas* masyarakat.

Ada beberapa program pemerintah yang mendukung upaya-upaya pemberdayaan wanita ini. Dalam PROPENAS, terdapat tiga program utama yang dikembangkan untuk memberdayakan dan meningkatkan peranan dan kedudukan perempuan dalam upaya pengarusutamaan gender/pemberdayaan perempuan, antara lain :

- a. *Program Peningkatan Kualitas Hidup Wanita*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai individu, sebagai bagian dari keluarga dan sebagai makhluk sosial, terutama di bidang-bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya. Dalam bidang Ekonomi diprioritaskan pada pembangunan ekonomi, khususnya ketenaga-kerjaan baik sektor formal maupun informal.
- b. *Program Pembangunan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan*. Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan menserasikan berbagai kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Upaya ini dilakukan tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya sesuai dengan semangat desentralisasi adalah pada tingkat daerah (propinsi dan kabupaten).
- c. *Program Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan, di samping peran institusi-institusi pemerintah dan lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan, terutama organisasi perempuan dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam setiap tahap dan proses pembangunan.

Di antara program-program yang ada tadi, salah satu program yang dibentuk oleh kelompok masyarakat lokal/internal untuk menangani masalah finansial dan sosial perempuan adalah Koperasi Warga (Kopaga) di wilayah RW 08 Kelurahan Kemanggisan Jakarta Barat. Wilayah ini sangat kumuh dan penduduknya padat. Pada tahun 1999 tercatat keluarga paling miskin sejumlah 104 KK di mana sebagian dari mereka adalah korban PHK dan yang gagal dalam bekerja di luar negeri (TKI). Di antara korban PHK tersebut banyak terdapat perempuan. Kondisi mereka sangat memprihatinkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menyekolahkan anak-anaknya mereka harus menjual barang yang dimilikinya satu persatu, bahkan di antaranya telah terjerat rentenir. Kondisi tersebut apabila dibiarkan akan memunculkan masalah yang kompleks. Permasalahan yang menarik adalah walaupun mereka hidup miskin, tetapi mereka tetap mempetahankan nilai-nilai tradisional yang merupakan kearifan lokal seperti kebersamaan, kegotong-royongan, dan hidup rukun walaupun berlatar belakang etnis yang heterogen.

Kopaga yang didirikan pada bulan Mei 1999 oleh kaum perempuan Kelurahan Kemanggisan ini diberi nama Koperasi Warga (Kopaga) "Kesuma Tiara". Jumlah anggota awal adalah 20 orang yang tergabung dalam dua kelompok di lingkungan 2 RT dan 1 RW, kemudian pada bulan Mei 2002 anggota Kopaga bertambah menjadi 677 orang yang tergabung dalam 28 kelompok dan tersebar di 29 RT dan 4 RW. Modal awal (pada Th.1999) yang berasal dari stimulan donatur sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*), pada bulan Mei 2002 telah berkembang menjadi Rp. 430.000.000,- (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*), yang dialokasikan untuk:

1. Kredit darurat (*resque*)
2. Kredit pemulihan (*recovery*)
3. Kredit pengembangan (*development*)
4. Kredit mandiri (*entrepreneur*)

Kopaga yang ada ini berbeda dengan jenis koperasi yang diproduksi pemerintah, oleh karena koperasi ini lahir dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga koperasi ini benar benar murni berbasis masyarakat (*community based*) dan bergerak di bidang sosial dan ekonomi.

Tujuan Kopaga pada awalnya adalah untuk memberdayakan perempuan-perempuan miskin yang mempunyai kegiatan ekonomi produktif. Tujuan ini berkembang sejalan dengan perkembangan jumlah dan kebutuhan anggota.

Bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah:

1. Personal (pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas perorangan) dengan cara

membangun, mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang mereka miliki.

2. Interpersonal (peningkatan kemampuan menjalin relasi dan mengemukakan pendapat, *bargaining*, bermusyawarah dan mengambil keputusan dalam kelompok).
3. Politik (menghimpun kekuatan bersama melalui organisasi kelembagaan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama secara ekonomi, sosial, fisik dan lingkungan).

Dalam pelaksanaan kegiatannya Kopaga "Kesuma Tiara" menggunakan kelompok-kelompok tradisional yang sudah ada di masyarakat. Keputusan siapa yang berhak memperoleh bantuan atau tidak adalah di dalam kelompok-kelompok kecil tersebut, sehingga kelompok mempunyai peranan yang sangat penting walaupun mereka hidup di komunitas metropolitan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal

---

### 3. SIMPULAN

1. Program-program penanggulangan kemiskinan yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat akar rumput melalui kelompok-kelompok tradisional (*traditional indigenous grouping*) menjadi hal yang efektif dan strategis untuk menangani masalah di komunitas lokal. Kelompok-kelompok tradisional yang dapat diberdayakan tersebut adalah kelompok pengrajin, kelompok arisan, dan kelompok

kekerabatan. Pada umumnya, dan boleh dikatakan semua sasaran pemberdayaannya adalah kaum perempuan miskin, yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Selain pemberdayaan ekonomi dilakukan juga pemberdayaan sosial dalam bentuk *interpersonal empowering*.

2. Koperasi Warga Kesuma Tiara dibentuk atas inisiatif kelompok-kelompok tersebut. Kopaga ini memberikan pelayanan mikro finansial kepada 677 anggotanya dengan aset modal sebesar Rp.430.000.000- (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*) yang dialokasikan untuk kredit darurat, kredit pemulihan, kredit pengembangan dan kredit mandiri.
3. Kopaga ini merupakan lembaga ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada nilai-nilai kemasyarakatan yang tumbuh kembang di daerah Kemanggisan. Nilai-nilai kemasyarakatan tersebut diantaranya adalah nilai gotong-royong, kemanusiaan, kepedulian sosial seperti program rentengan (*tanggung bersama*).
4. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Kopaga sangat dirasakan manfaatnya, tidak hanya oleh pengurus yang dulunya mantan anggota, tetapi dirasakan pula oleh para ketua-ketua kelompok di masing-masing RW/RT, maupun oleh anggota koperasi yang memang menerima secara langsung proses pemberdayaan tersebut. Umumnya mereka ini terdiri dari kaum perempuan miskin yang tergabung sebagai anggota Kopaga Kesuma Tiara. Keberdayaan yang dialami

oleh pengurus, ketua kelompok maupun anggota kelompok yang tergabung dalam Kopaga Kesuma Tiara secara personal, interpersonal dan politikal adalah sebagai berikut:

#### a. Keberdayaan secara personal

Dari hasil analisis penelitian sebagai mana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kopaga Kesuma Tiara telah melakukan pemberdayaan secara personal terhadap kaum perempuan miskin di kelurahan Kemanggisan. Upaya pemberdayaan ini dilakukan dalam bentuk bimbingan motivasi untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri kaum perempuan sebelum dialokasikan bantuan modal usaha ekonomi produksi.

Bantuan modal usaha hanya bersifat sebagai media, tetapi bimbingan motivasi dan pelatihan-pelatihan dasar singkat yang dilakukan Kopaga Kesuma Tiara adalah upaya-upaya pemberdayaan untuk membangkitkan harga diri dan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki kaum perempuan miskin di Kelurahan Kemanggisan.

Bantuan yang diperoleh dari Kopaga dalam bentuk pinjaman merupakan modal pengembangan usaha ekonomi keluarga yang bergerak di bidang usaha pangan dan sandang. Hasil usaha ekonomi keluarga tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Terbantunya pemenuhan kebutuhan tersebut, maka kesejahteraan keluarga anggota meningkat, juga

menambah rasa percaya diri anggota di dalam keluarga maupun masyarakat khususnya para perempuan selaku ibu rumah tangga. Pembinaan yang dilakukan oleh pengurus koperasi setiap bulan menambah pengetahuan dan kemampuan anggota dalam mengungkapkan pendapat di dalam media-media pertemuan.

Sebagai pengurus Kopaga yang sudah mendapat kepercayaan dari anggota dan mendapatkan kesempatan mengikuti berbagai pelatihan dan pertemuan tentang pengelolaan organisasi dan koperasi, maka pengurus tersebut mempunyai kelebihan dari aspek pengetahuan, kemampuan dan kewenangan dalam memanager dan memimpin Kopaga tersebut. Perlu dipahami bahwa mulai dari pengurus sampai dengan anggotanya adalah perempuan tetapi ada pemikiran untuk mengikut sertakan kaum pria sebagai anggota koperasi, tetapi dalam rangka pengembangan Kopaga jangka panjang.

#### b. Pemberdayaan Interpersonal

Pertemuan kelompok, pertemuan koperasi maupun pertemuan-pertemuan lainnya merupakan media atau wahana seseorang untuk berinteraksi dan berinterrelasi dengan orang lain, baik yang berhubungan dengan kegiatan koperasi maupun kegiatan kemasyarakatan, seperti kegiatan pengajian atau arisan. Banyak sedikitnya jumlah orang yang terlibat dalam pertemuan-pertemuan kelompok tersebut juga mempengaruhi terhadap kemampuan dirinya dalam

berinteraksi dengan lingkungannya.

Ketua kelompok mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam berinterrelasi dibanding dengan anggota kelompok. Hal ini ditunjukkan melalui pertemuan-pertemuan anggota dengan ketua kelompok, pertemuan ketua kelompok dengan pengurus koperasi, disamping pertemuan-pertemuan lain di luar pertemuan tersebut.

Pengurus koperasi lebih banyak berinterelasi dengan pihak luar seperti dengan Bank, organisasi kemanusiaan, organisasi kemasyarakatan lainnya; disamping juga dengan anggota maupun pengurus lainnya.

#### c. Keberdayaan Secara Politikal

Keberdayaan yang dialami anggota dan pengurus secara politikal adalah dalam hal pengambilan keputusan dalam keluarga, kelompok, koperasi, atau kelompok lain yang ada di lingkungan masyarakat.

Dengan adanya keyakinan akan kemampuan diri serta mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keluarga dan usaha ekonomi keluarga maka keberadaan dirinya didalam keluarga cukup diperhitungkan, hal ini dapat ditunjukkan pada pengambilan keputusan dalam urusan keluarga seperti menentukan jenis usaha, jumlah produk dan kebutuhan keluarga yang mendesak. Pada waktu mengakses lembaga ekonomi pengurus Kopaga ikut terlibat dalam *bargaining power* untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan.

Pemberdayaan yang dilakukan Kopaga Kesuma Tiara adalah suatu proses. Pada tahap pertama anggota diberdayakan secara personal. Pemberdayaan personal merupakan suatu dasar untuk tercapainya pemberdayaan secara interpersonal dan political power.

Pemberdayaan personal banyak dialami dan dirasakan oleh anggota. Pada tahap ini anggota masih berpikir untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, baik kebutuhan secara fisik, psikologis dan sosial. Pemberdayaan interpersonal banyak dialami oleh Ketua Kelompok. Pada level ini kedua kelompok tidak hanya berfikir untuk dirinya sendiri tetapi juga berfikir tentang kelompoknya, tentang anggotanya. Hal ini sehubungan dengan posisi sosial dia sebagai ketua kelompok.

Pemberdayaan power/politik dialami oleh pengurus koperasi sebagai lembaga formal telah menghimpun kekuatan kelompok yang ada di masyarakat, menjadi kekuatan yang lebih besar dan mendistribusikan sumber ke seluruh anggota melalui kelompok. Oleh karena itu sebagai organisasi formal koperasi mampu mengakses system sumber di luar untuk kemajuan dan pengembangan koperasi.

---

#### 4. SARAN / REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka kami menyarankan sebagai berikut :

1. Pada umumnya perempuan

memiliki sifat-sifat khas seperti : teliti, sabar, ulet, rapi, ingin maju, penuh perhatian dan lainnya. Hal ini terlihat sebagaimana yang dilakukan kaum perempuan pada Kopaga Kesuma Tiara. Secara jujur harus kita akui bahwa keberhasilan Kopaga Kesuma Tiara ini salah satunya karena andil para anggota yang sebagian besar terdiri dari perempuan. Oleh karena itu disarankan agar model ini dapat dijadikan sebagai *pilot proyek* bagi koperasi primer lain yang ada di daerah-daerah yang mempunyai karakteristik relatif sama dengan Kopaga Kemanggisan.

2. Perlu kiranya dilakukan kajian-kajian atau seminar tentang pemberdayaan perempuan dengan melibatkan *Stakeholder* termasuk didalamnya perempuan selaku pengamat maupun pelaku. Hal ini dilakukan untuk memahami lebih jauh lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan melalui Kopaga baik di lingkungan keluarga, koperasi maupun masyarakat pada umumnya.
3. Perlu meningkatkan media-media kesempatan bagi perempuan dalam berbagai bidang baik ekonomi, sosial, politik, budaya maupun lainnya baik dalam komunitas mikro maupun makro sehingga ada kesetaraan dan kemitraan dengan kaum pria.

---

#### PUSTAKA ACUAN

- Adi Isbandi Rukminto, 2001.  
*Pemberdayaan, Pengembangan*

*Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: LPFEUI.

Adi Mihardja, Kusnaka dan Harry Hikmat, 2001. *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Cary, Lee J., 1970. "The Role of Citizen in The Community Development Process" dalam *Community Development as a Process*. (Lee J. Cary, Editor). Missouri: University of Missouri Press.

Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2002 *Konsep Gender dan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*.

Suradi. M.Si & Tuti, K. MS,. *Penelitian Pemberdayaan Perempuan Berbasis KOPAGA*, Kesuma Tiara, STKS, Bandung 2002.